

ABSTRAK

Rahayu Intan Permata Sari (56588/2010): Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Provinsi Sumatera Barat. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di bawah Bimbingan Bapak Dr. Idris, M.Si dan Ibu Ariusni, SE, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh tingkat pengangguran terhadap kriminalitas di Sumatera Barat; (2) Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kriminalitas di Sumatera Barat; (3) Pengaruh upah terhadap kriminalitas di Sumatera Barat; (4) pengaruh kepadatan penduduk terhadap kriminalitas di Sumatera Barat dan (5) Pengaruh tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, upah dan kepadatan penduduk terhadap kriminalitas di Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif. Jenis data adalah data sekunder dan poling yaitu gabungan data *time series* dan *cross section* dengan periode waktu 2009-2012. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan studi pustaka. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif dan Analisis Induktif yang terdiri atas: Analisis data panel, Koefisien Determinasi (R^2), Uji t dan Uji F.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Sumatera Barat; (2) tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Sumatera Barat; (3) upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Sumatera Braat; (4) kepadatan penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Sumatera Barat dan (5) tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, upah dan kepadatan penduduk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan kepada pemerintah agar dapat meningkatkan tingkat upah minimum regional (UMR) atau rata-rata upah di setiap daerah. Bagi pemilik dan pengelola badan usaha, upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan seperti meningkatkan upah/gaji dapat mengurangi potensi terjadinya perbuatan kriminal. Untuk masalah kependudukan diperlukan kebijakan tersendiri berkaitan langsung dengan masalah jumlah penduduk. Diharapkan kepada pihak pemerintah dan pihak terkait serta masyarakat tersendiri untuk turut berpartisipasi dalam menjalankan kebijakan pemerintah dalam menangani masalah kependudukan. Melalui kebijakan dalam menekankan laju pertumbuhan penduduk agar tercapai kebijakan tersebut dapat turut membantu dalam mengatasi masalah kependudukan yang begitu padat dan mengurangi masalah- masalah kriminalitas.